# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## (L K j I P)

## Tahun 2025

**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**
**JL.KAPTEN ANWAR SASTRO NO. 1251 PALEMBANG**
**TELP. 0711-352302 FAX. 0711-361381**

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan target yang tercantum pada Rencana Perangkat Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026. Tujuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024-2026 yang telah direviu dan menjadi tugas dan fungsi yaitu:

***"Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air".***

LKjIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palembang, 27 februari 2026
**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Ir. H. HERWAN, MM.**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660601 199003 1 004

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja yang telah selaras dengan IKU (indikator kinerja utama) dan IKD (indikator kinerja daerah) yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra (rencana strategis) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan yang telah sesuai dengan Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah:

***"Melaksanakan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air"***

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Mengengah Daerah karena masa akhir jabatan kepala daerah periode 2018-2023 berakhir, maka pada awal Tahun Anggaran 2025 penetapan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan IKU (indikator kinerja utama) yang tercantum pada Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang telah berkesesuaian dengan dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja dimaksud dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

*Perjanjian Kinerja Awal Tahun Anggaran 2025*

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan/Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik | - Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi | 61,24 % |
| 2. | - Meningkatnya Pengamanan Kawasan Tebing Rawan Longsor dan Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai | - Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | 91,86 % |

Dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan melalui ***Program Pengelolaan Sumber Daya Air*** dengan realisasi kinerja berdasarkan indikator pada tabel 1.1 diatas adalah sebagai berikut:

1. *Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi* dengan realisasi kinerja hingga akhir triwulan IV sebesar **82,58** %.
2. *Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir* dengan realisasi kinerja hingga akhir triwulan IV sebesar **77,16** %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja setiap indikator secara umum tidak mencapai target yang diharapkan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya perubahan anggaran dimana pada awal Tahun Anggaran 2025 pagu untuk ***Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp. 93.398.286.039,-*** berubah menjadi ***Rp. 86.540.404.416,-***, dikarenakan adanya recofusing anggaran dan menyebabkan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian Program tersebut tidak mencapai target diantaranya:

- Kegiatan normalisasi Sungai
- Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
- Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Isu strategis yang dihadapi wilayah Sumatera berupa tingginya kerentanan dan potensi bencana. Isu tersebut menunjukkan beberapa tantangan permasalahan dan kendala yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan ke depan untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, terutama tantangan terhadap dampak perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan penggunaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan diantaranya berupa alih fungsi lahan persawahan ke bentuk non sawah. Masih terdapatnya lahan pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan provinsi yang belum tersentuh/dikembangkan, hal ini merupakan faktor pendorong potensi pengelolaan irigasi yang berkelanjutan kedepannya.

Selanjutnya, periode pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025, Oleh sebab itu, disusun kembali dokumen RPJMD untuk

periode ini. Dokumen RPJMD tahun 2025-2029 ini juga selaras dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah

***"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA".***

Isu potensi jumlah air yang dapat disalurkan berkaitan dengan ketersediaan air dalam suatu wilayah, serta kapasitas infrastruktur yang baik dan sistem pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai upaya mengatasi isu-isu tersebut diatas dan keterkaitan kebijakan pada Visi serta Misi Gubernur terpilih tahun 2025-2029 dan perbaikan kinerja kedepan, Dinas Pengeleolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah menyelaraskan Tujuan/Sasaran dan Indikator pada Dokumen Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 sesuai Dokumen RPJMD tahun 2025-2030, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.2

*Perjanjian Kinerja (perubahan) Tahun Anggaran 2025*

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air serta penanggulangan sumber daya yang berkelanjutan | 1.1. | Kapasitas Air Baku | $m^3$/detik | 2,24 |
| | | 1.2. | Indeks Ketahanan Air Provinsi | Indeks | 3,57 |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air serta penanggulangan sumber daya yang berkelanjutan | 1.1. Kapasitas Air Baku | $m^3$/detik | 2,24 |
| | | 1. Indeks 2. Ketahanan Air Provinsi | Indeks | 3,57 |

Data dimaksud merupakan penyelarasan terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan telah memperhatikan karakteristik yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat membantu sebagai bahan evaluasi rencana serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

# Daftar Isi

Kata Pengantar ..... ii
Ikhtisar Eksekutif ..... iii
Daftar Isi ..... vii
BAB 1 Pendahuluan ..... 0
1.1 Struktur Organisasi ..... 4
1.2 Tugas dan Fungsi ..... 6
1.3 Isu-isu Strategis ..... 7
1.4 Sumber Daya ..... 7
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana ..... 8
1.6 Keuangan ..... 9
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ..... 10
BAB 2 Perencanaan & Perjanjian Kinerja ..... 12
2.1 Perencanaan Kinerja ..... 12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... 13
2.2 Perjanjian Kinerja ..... 21
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja ..... 24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... 24
3.2 Realisasi Anggaran ..... 4
3.4 Analisis dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ..... 6
BAB 4 Penutup ..... 9
4.1 Kesimpulan ..... 9
4.2 Tindak Lanjut ..... 10
LAMPIRAN

## Daftar Tabel & Gambar


BAB 1 Pendahuluan ..... 0

1.1 Perjanjian Kinerja Awal Tahun Anggaran 2025 ..... iii

1.2 Perjanjian Kinerja (perubahan) Tahun Anggaran 2025 ..... v

I.1 Jumlah Pegawai Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2025 ..... 3

I.2 Jumlah Pegawai Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pangkat / Golongan Per 31 Desember 2025 ..... 7

I.3 Jumlah Pegawai ASN Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025 ..... 4

I.4 Jumlah Pegawai ASN Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2025 ..... 4

BAB 2 Perencanaan & Perjanjian Kinerja ..... 12

II.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 ..... 14

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Suamtera Selatan Tahun 2023 ..... 17

II.2 Sinkronisasi Perjanjian Kinerja Tahun terhadap Program dan Kegiatan serta arah kebiajakan Perangkat Daerah ..... 18

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja ..... 20

III.2 Tabel Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026 ..... 21

III.3 Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 serta target akhir RPJMD ..... 21

III.4 Tabel Rencana Aksi Program dan Kegiatan tahun 2025 ..... 22

# BAB 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang

**Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dan diteruskan dengan Peraturan Gubernur nomor 44 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 dan Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah tersedia informasi evaluasi yang ada dan ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **81,29 (delapan puluh satu koma dua puluh sembilan)** atau **predikat "A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,14 (delapan puluh koma dua puluh empat) atau predikat "A" (memuaskan)**. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari hasil penilaian dan evaluasi SAKIP dikarenakan terdapat nilai pada komponen capaian kinerja. Namun demikian masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada tahun selanjutnya, yaitu Rekomendasi pada beberapa hal sebagai berikut :

a. Memberikan penilaian kepada seluruh pegawai unit organisasi.

b. Menghimbau setriap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyelesaian (recofusing) organisasi.

d. Menmaafkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian anggaran.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan/semester atas hasil pengukuran kinerja pegawai dalam organisasi.

f. Menyusun tim reviu internal untuk melakukan reviu laporan kinerja pada unti organisasi.

g. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja.

h. Memanfaatkan hasil laporan kinerja dalam evaluasi pelaporan keberhasilan kinerja yang terdapat pada Bab IV Laporan Kinerja unit organisasi.

Dalam rangka memperbaiki atas hasil evaluasi SAKIP tahun2025 atas tahun 2024 tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan akan menindaklanjuti dan memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang tersebut di atas sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Adapun tindak lanjut atas hasil evaluasi diatas beserta rencana aksi perbaikan kinerja yang akan datang telah dituangkan melalui tabel berikut ini:

Tabel I. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Dinas PSDA Prov. Sumatera Selatan Tahun 2024

| No. | REKOMENDASI | RENCANA AKSI | RENCANA AKSI / LANGKAH KERJA | OUTPUT / HASIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Memberikan penilaian kepada seluruh pegawai pada unit organisasi** | Penialaian Kinerja dan pemantauan pelaksaannya akan dilakukan berkelanjutan | 1. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja<br>2. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut menjadi acuan setiap pegawai mengisi Kinerja Harian melalui Aplikasi My-ASN<br>3. Penilian Kinerja dilaksanakan setiap bulannya | Telah dilakukan penilaian kinerja berjenjang kepada seluruh pegawai oleh pimpinan organisasi termasuk unit pelaksana teknis PD dan pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **Menghimbau setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja** | Penyampaian hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai dan pelaksanaannya akan dilaksanakan berkelanjutan | 1. menyusun pengukuran kinerja instansi/OPD<br>2. Menyampaikan melalui rapat, apel, atau forum internal<br>3. melakukan monitoring dan evaluasi | - Setiap pegawai paham dan peduli atas kinerja<br>- Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan |
| 3 | **Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian (recofusin) organisasi** | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja secara berkala | - Menyusun Laporan monitoring dan evaluasi yang telah mengambarkan pengukuran kinerja terhadap pemenuhan PK eselon II hingga esselon IV per triwulan | Laporan monitoring dan evaluasi yang telah mengambarkan pengukuran kinerja terhadap pemenuhan PK eselon II hingga esselon IV per triwulan |
| 4 | **memanfaatkan hasil pemgukuran kinerja dalam penyesuaian anggaran** | Pengumpulan Data Kinerja setiap bidang secara periodik | - Pengumpulan data capaian kinerja - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja secara berkala - memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) | Dilakukan penyesuaian Anggaran untuk target-target yang belum tercapai atau belum on the right track. |
| 5 | **Melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan/semester atas hasil pengukuran kinerja pegawai dalam organisasi** | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja Pegawai | - Pengukuran kinerja tahunan mempengaruhi penyesuaian organisasi dan dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta pengukuran kinerja sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **Menyusun tim reviu internal untuk melakukan reviu laporan kinerja pada unit organisasi** | Pembentukan Tim reviu internal disusun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) agar dapat melakukan reviu secara independen | - Dokumen Laporan Kinerja telah direviu secara internal. (Pegawai yang melakukan reviu laporan kinerja tidak sama dengan Pegawai yang menyusun laporan kinerja)<br>- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program, kegiatan dan penyerapanan anggaran | Pembentukan Tim Reviu Internal yang melakukan reviu kinerja secara independen dan dokumen laporan kinerja yang telah dinilai secara mandiri |
| 7 | **Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja** | Pengumpulan/penyusunan Data dan Informasi yang melibatkan peran serta seluruh pegawai | - Penyajian informasi dalam laporan kinerja dinyatakan menjadi kepedulian seluruh Pegawai dengan bukti dan data dukung | Surat pernyataan Penilaian Mandiri (PM) Sakip tahun 2025 dan dok TL LHE |
| 8 | **Memanfaatkan hasil laporan kinerja dalam evaluasi pelaporan keberhasilan kinerja yang terdapat pada Bab IV laporan kinerja unit organisasi** | Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Informasi yang akurat secara berkala | - Laporan kinerja setiap unit kerja dilaporkan setiap tanggal 10 setiap bulannya- Setiap hasil laporan kinerja akan digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja lebih baik kedepannya | Data dan Informasi yang akurat |

Adapun Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah :

"MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE"

## 1.1 Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1) Pimpinan : Kepala
2) Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian
3) Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian jabatan pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan dibawah ini :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
   a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Rekayasa Teknik
   a. Seksi Survei
   b. Seksi Desain Irigasi dan Rawa
   c. Seksi Desain Sungai dan Danau
4. Bidang Konstruksi
   a. Seksi Konstruksi Irigasi dan Rawa
   b. Seksi Konstruksi Sungai dan Danau
   c. Seksi Tata Teknik
5. Bidang Operasi dan Pemeliharan :
   a. Seksi Operasi
   b. Seksi Pemeliharaan
   c. Seksi Penanggulangan Darurat
6. Bidang Bina Manfaat :
   a. Seksi Sarana Teknik
   b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
   c. Seksi Kerjasama

Struktur Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Musi dan Sugihan Adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
    - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
    - Kepala Seksi Hidrologi
    - Kepala Seksi Operasional
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
    - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
    - Kepala Seksi Hidrologi
    - Kepala Seksi Operasional

Terkait dengan tugas dan struktur organisasi perangkat daerah tersebut, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu :

- Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan rekayasa teknik, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta manfaat;
- Penyelengaraan kebuijakan rekayasa teknik, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta manfaat;
- Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan sumber daya air meliputi rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta manfaat;
- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas PSDA;
- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Berikut bagan struktur organisasi kepegawaian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (gambar I.1)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

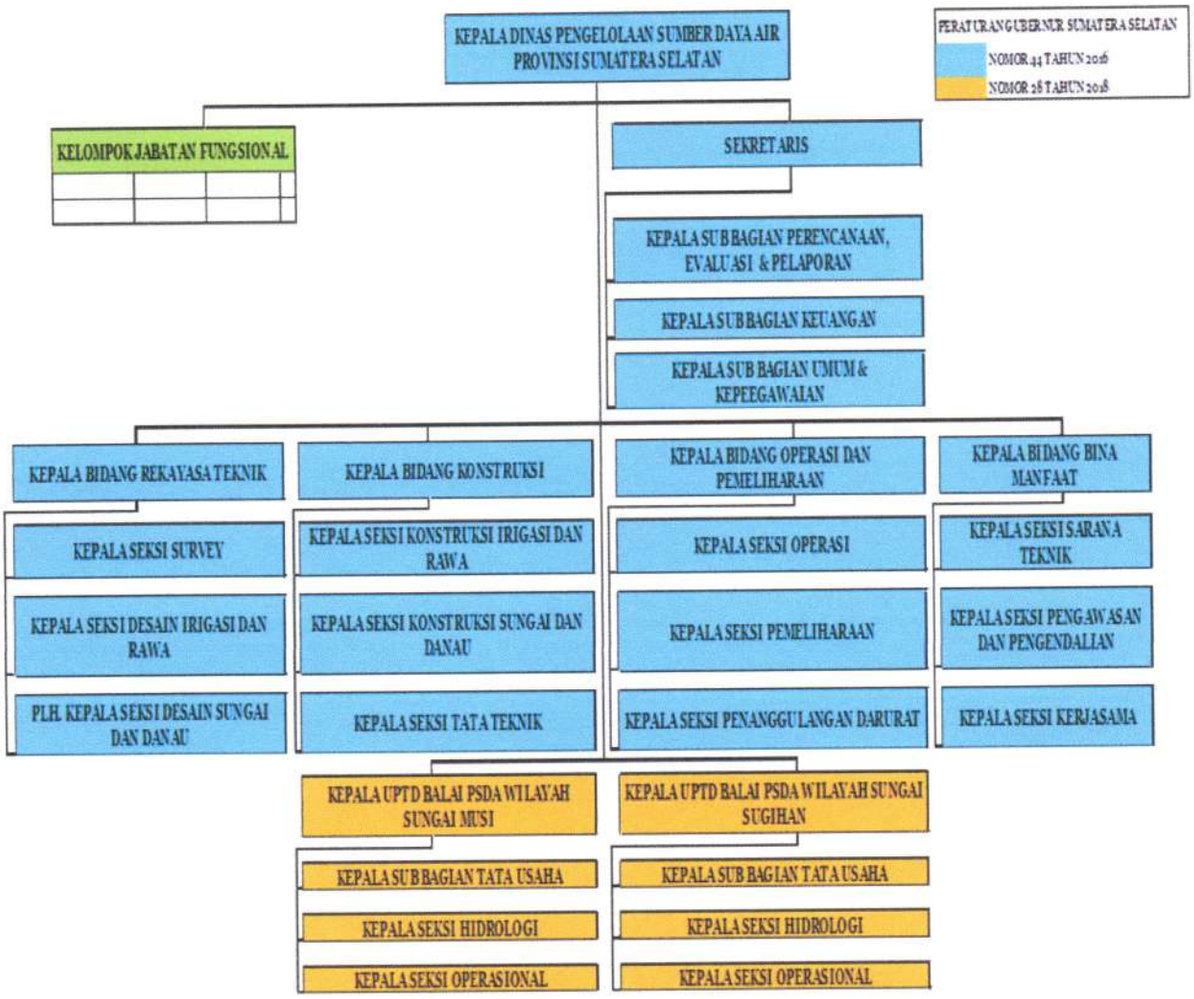


## 1.2 Tugas dan Fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.07 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.89, tambahan Lembaran Negara No.4741), maka pembentukan Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan No.38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.2 Seri D) dan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan resmi berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tetap memiliki satu (1) Sekretariat, empat (4) bidang dan dua (2) Balai/UPTD, namun beberapa bidang memiliki Tupoksi yang berbeda dari sebelumnya.

## 1.3 Isu-isu Strategis

Strategi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek sumber daya manusia, sarana, prasarana dan keuangan/anggaran.

## 1.4 Sumber Daya

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 95 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2025

| No | Jenis Jabatan | Jumlah (orang) | Pria | Wanita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabatan Struktural | **25** | 23 | 2 |
| 2 | Jabatan Fungsional Umum | **61** | 35 | 28 |
| **JUMLAH** | | **86** | 60 | 37 |

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pangkat / Golongan Per 31 Desember 2025

| No | Pangkat / Golongan | Jumlah (orang) | Pria | Wanita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golongan IV | 8 | 11 | 3 |
| 2 | Golongan III | 68 | 35 | 28 |
| 3 | Golongan II | 17 | 6 | 3 |
| 4 | Golongan I | - | - | - |
| **JUMLAH** | | **86** | 52 | 34 |

Tabel I.3 Jumlah Pegawai ASN Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah (orang) | Pria | Wanita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarjana/Pasca Sarjana | **132** | 17 | 4 |
| 2 | Diploma IV | - | - | - |
| 3 | Diploma III | **22** | 5 | 9 |
| 4 | SLTA /sederajat | **45** | 8 | 3 |
| 5 | SLTP/sederajad | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SD/sederajad | - | - | - |
| **JUMLAH** | | **86** | 57 | 29 |

Tabel I.4 Jumlah Pegawai ASN Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2025

| No | Gender | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1 | Pria | 58 |
| 2 | Wanita | 28 |
| **JUMLAH** | | **86** |

## 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Guna mendukung fungsi manajemen pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sarana dan prasarana perkantoran yang memadahi.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu:

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 3.375.578 M2 yang terdiri dari tanah sebagai berikut:

- Tanah Bangunan Kantor : 3.228,75 M2
- Tanah Jaringan/Saluran : 178.438 M2
- Tanah Untuk Bangunan

Pengaman Sungai dan Tanggul : 18.053 M2

- Tanah Rawa : 3.341.620,200 M2
- Tanah Waduk : 2.336 M2
- Tanah Non Persil Lainnya : 10.000 M2

Tanah Jaringan/Saluran terletak di Lempuing Kab. OKU Timur Sumatera Selatan. Tanah tersebut masih dalam proses pembuatan sertifikat.

Tanah kosong terletak di jalan Ade Irma Nasution No. 10 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 3.529 M2 yang terletak diatas tanah seluas 3.228,75 M2 di Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan senilai Rp. 5.551.173.600,-

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari Alat-alat kantor/Rumah Tangga, Alat Studio serta Perangkat Komputer yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki sebanyak 22 buah yang terdiri dari 2 (Dua) buah Jeep Mitsubishi Pajero Sport, 7 (Tujuh) buah Minibus Toyota Kijang Innova J M/T, 1 (satu) buah Toyota Kijang Innova E M/T, 1 (Satu) buah Minibus Toyota Hilux, 1 (Satu) buah Minibus Toyota Kijang Innova

Luxury V, 5 (lima) buah Isuzu/grand touring, 3 (tiga) unit Excavator dan 1 (Satu) Unit dump Truck.

Nilai kelompok barang aset yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kelompok Barang Aset

| No. | Kelompok Barang | Nilai (Rp.) |
|---|---|---|
| 1. | Tanah | 26.173.825.230 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 23.820.182,190 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 6.189.426.600 |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 907.814.474,41 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 32.446.793,75 |

## 1.6 Keuangan

Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh anggaran belanja awal yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar

**Rp 1191.977.193.960,-** yang terdiri atas :

**Belanja Operasi** : **Rp 61.814.521.751,-**

» *Belanja Pegawai* : Rp 15.046.697.005,-

» *Belanja Barang dan Jasa* : Rp 46.767.824.746,-

**Belanja Modal** : **Rp Rp35.455.899.824,-**

Belanja Operasi APBD terdiri atas 02 Program dan 09 Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pagu Anggaran Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 21.685.009.000,-** yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum, dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program dukungan manajemen, Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA, terdiri dari:

- Kegiatan Jaringan Irigasi Permukaan Rp. 5.743.232.000,-
- Kegiatan Jaringan Irigasi Rawa Rp. 14.547.237.000,-
- Program dukungan manajemen Rp. 1.394.540.000,-

## 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan– dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat *sasaran utama yang ingin diraih* instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana *kaitannya dengan capaian visi dan misi* Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

# BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

**Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

### 2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah membuat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode Tahun 2024 - 2026, dimana strategi pada dasarnya adalah langkah-langkah konseptual dan konprehensif untuk memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, disusun memuat program-program pembangunan bidang sumber daya air yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan (Renja). Rumusan isu strategis pembangunan bidang sumber daya air, pemikiran, dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal. Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan telah ditetapkannya Inmendagri No.52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah

Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru serta Surat Edaran Sekda Nomor 069/SE/BAPPEDA-V/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024- 2026.

Upaya untuk mencapai visi daerah Sumatera Selatan 2024 2026 yang dirumuskan sebagai "Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan" serta misi pembangunan daerah Sumatera Selatan terutama di bidang SDA haruslah dituangkan ke dalam perencanaan dan strategi pembangunan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat diukur serta diarahkan sesuai dengan sasaran dan terget yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat mendukung Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 "**Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan"** dan tertuang pada tema/agenda per tahun yaitu:

1. Tahun 2024 yaitu ***"Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan"***
2. Tahun 2025 yaitu ***"Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan"***
3. Tahun 2026 yaitu ***"Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan"***

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Upaya untuk mencapai visi daerah Sumatera Selatan 2024-2026 yang dirumuskan sebagai "Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan" serta misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan terutama di bidang SDA haruslah dituangkan ke dalam perencanaan dan strategi pembangunan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat diukur serta diarahkan sesuai dengan sasaran dan terget yang sudah ditetapkan sebelumnya.

*Tujuan dan Sasaran*

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 "Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan" yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Untuk setiap misi yang terkait dengan Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menetapkan sejumlah *Tujuan* yang relevan, yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
2. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Produksi Komoditas Unggulan
3. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada Daerah Bencana yang Berisiko Tinggi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan serta memperhatikan sasaran kinerja sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk setiap *Sasaran* yang dijabarkan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Pengelolaan Aset
6. Terwujudnya Infrastruktur daerah irigasi Permukaan /irigasi rawa yang berfungsi baik
7. Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai dan Bangunan Pengendalian Banjir
8. Meningkatnya pengamanan kawasan tebing rawan longsor.
9. Terjaganya/ Kapasitas Ketersediaan Air baku untuk irigasi

Keterkaitan dengan pernyataan tujuan dan sasaran diatas serta kondisi awal dan target capaian dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, dapat digambarkan melalui tabel berikut:

**Tujuan dan Sasaran Renstra**
**Dinas Pengelolan Sumber Daya Air**

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
| | MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN | | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%) | % | 100% | 100% | 100% |
| | | 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi | persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi | % | 100% | 100% | 100% |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
| | | **Pembangunan Daerah** | **kinerja Perangkat daerah** | | | | |
| | | | Jumlah dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan | Dok | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jumlah Dokumen dalam koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja | Dok | 1 | 2 | 2 |
| | | **2 Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | | | Frekuensi penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Tahun | 1 | 1 | 1 |
| | | | Frekuensi penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN | Tahun | 1 | 1 | 1 |
| | | **3 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara** | **Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | | | Jumlah Pakaian dinas Aparatur yang tersedia | Setel | 0 | 660 | 20 13 |
| | | | Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur | OPD | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur | OPD | 1 | 1 | 1 |
| | | **4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik** | **Persentase pelaksanaan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | | | Jumlah gedung yang mendapatkan komponen listrik / penerangan | gedung | 4 | 4 | 4 |
| | | | Jangka waktu tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tahun | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jangka waktu tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Tahun | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jangka waktu tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tahun | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jangka waktu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan | Tahun | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jumlah rapat dinas yang | Rapat | 50 | 35 | 35 |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
| | | | dilaksanakan | | | | |
| | | | Frekuensi waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tahun | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jumlah kegiatan media publikasi infrastruktur SDA yang terlaksana | Kegiatan | 1 | 1 | 1 |
| | | | **Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang OPD** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | | | Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat | Unit | 0 | 4 | 0 |
| | | | Jumlah pengadaan alat berat dinas | Unit | 1 | 0 | 3 |
| | | | Jumlah Jenis pengadaan mebel | Jenis | 4 | 0 | 0 |
| | | | Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jenis | 8 | 0 | 0 |
| | | | Luas lahan yang tersedia penunjang sumber daya air | M2 | 40000 | 15000 | 0 |
| | | | Jumlah sewa gedung kantor | Unit | 2 | 0 | 0 |
| | | | Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan | Jenis | 6 | 3 | 3 |
| | | | **persentase penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | | | Jumlah Rekening penyediaan rekening listrik, PDAM dan komunikasi, air yang dibayar selama setahun | rekening | 4 | 4 | 4 |
| | | | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jasa pelayanan | 3 | 3 | 3 |
| | | **5 Meningkatnya Pengelolaan Aset** | **persentase pemeliharaan barang milik Daerah penunjang** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | | | Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perizinan | unit | 32 | 36 | 39 |
| | | | Jumlah Jenis Peralatan dan mesin yang dipelihara | Jenis | 6 | 6 | 6 |
| | | | Jumlah kebutuhan pemeliharaan rutin gedung | Gedung | 3 | 0 | 2 |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
| | | | Jumlah kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Jenis | 3 | 3 | 3 |
| | | | **Persentase pengelolaan Sumber Daya Air yang terlaksana** | **%** | **77,53%** | **80,12%** | **82,81%** |
| | | | **Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir** | **%** | **87,82%** | **91,86%** | **95,91%** |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia | Dok | 1 | 17 | 17 |
| | | | Panjang aliran sungai dan Bangunan pengendalian banjir yang dinormalisasi | M' | 2000 | 12000 | 12000 |
| | **MENINGKATNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA DAERAH BENCANA YANG BERISIKO TINGGI** | **Meningkatnya pengamanan kawasan tebing rawan longsor dan Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai** | Jumlah wilayah Sungai yang dioperasional | Wilayah Sungai | 2 | 2 | 2 |
| | | | Jumlah Kegiatan dalam pelaksanaan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (rekomtek) | Keg | 1 | 0 | 1 |
| | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 1 | 1 | 1 |
| | | | Panjang saluran sungai yang dioperasional dan dipelihara | M' | 64000 | 12000 | 12000 |
| | | | Panjang tebing sungai yang diperkuat | M' | 250 | 2000 | 2000 |
| | | **Terjaganya/ Kapasitas Ketersediaan Air baku untuk irigasi** | Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia | Dok | 1 | 4 | 5 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia | Dok | 0 | 0 | 0 |
| | | | Jumlah Sumur bor yang dibangun | Unit | 5 | 1 | 1 |
| | | | Luas Polder/Kolam Retensi yang dibangun | Hektar | 1,5 | 0,2 | 0,1 |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
| | | | Luas embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi | Hektar | 1,5 | 0 | 0 |
| | | | Luas Polder/Kolam Retensi yang ditingkatkan | Hektar | 9 | 1 | 6,5 |
| | | | Luas Embung dan Penampungan Air yang dioperasi dan dipelihara | Hektar | 0 | 1,5 | 1,5 |
| | | | Luas kolam retensi yang dioperasi dan dipelihara | Hektar | 1 | 0 | 0 |
| . | | | **Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi** | **%** | **59,74%** | **61,24%** | **62,73%** |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun | Dok | 9 | 15 | 15 |
| | **MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN** | **Terwujudnya Infrastruktur daerah irigasi Permukaan /irigasi rawa yang berfungsi baik** | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi | M' | 2733 | 3672 | 4570 |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi rawa yang direhabilitasi | M' | 25785 | 4800 | 4800 |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasional dan dipelihara | M' | 234412 | 5000 | 5000 |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasional dan dipelihara | M' | 600 | 1500 | 6300 |
| | | | Jumlah Sekretariat unit pengelolaan yang difasilitasi | Sekretariat | 1 | 1 | 1 |

*Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026.*

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya air di Sumatera Selatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada, serta memperhatikan kelemahan dan hambatan yang mungkin dihadapi dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Arah Kebijakan dan Program - Program Strategis. Pendekatan yang dilakukan

untuk menyusun arah kebijakan dan program-program strategis ini adalah multidimensional dan integratif.

Adapun Sasaran Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Meliputi :

1. Mengoptimalkan & Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi, Rawa dan Sungai.
2. Mengelola dan menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, rawa dan sungai.
3. Memperbaiki dan rekonstruksi kerusakan insfrastruktur akibat banjir.
4. Mengembangkan sistem informasi teknologi / data base Sumber Daya Air.
5. Menyediakan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
6. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan sumber daya aparatur.
7. Meningkatkan Kinerja SDM melalui sarana dan prasarana pendukung.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Mengengah Daerah karena masa akhir jabatan kepala daerah periode 2018-2023 berakhir, maka Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Periode Transisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026. Selanjutnya, periode pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025.

RPJMD tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah ***" SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA "*** dan dalam upaya pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam 7 Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasai perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Penyusunan RPJMD, telah melalui analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan serta rencana program pembangunan. Salah satu rekomendasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu RPJMD Provinsi Sumatera Selatan juga didasarkan pada KLHS RPJMD dalam rangka mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Adapun sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra yang selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2025 ini beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah diselaraskan pada Renstra, IKU/IKD, dan anggaran atau DPA serta Pohon kinerja/Cascading dan merupakan komitmen untuk mencapai target indikator sasaran yang telah diuraikan diatas.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan pada awal Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan/Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik | - Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi | **61,24 %** |
| 2. | - Berkurangnya Sedimentasi Pada Aliran Sungai dan Bangunan Pengendali Banjir dan Meningkatnya Pengamanan Kawasan Tebing dan Longsor | - Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor Yang Terlindungi Oleh Insfrastruktur Pengendalian Banjir | **91,86 %** |

*Tabel 2..2 Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.*

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan perlu menyelaraskan dengan dokumen-dokumen Nasional, Provinsi dan Daerah sehingga menghasilkan dokumen yang selaras, sinergis dan tepadu. Dimana keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan RENSTRA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan terhadap Indikator Kinerja

Utama (IKU) dengan Program/Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sendiri serta pencapaian kinerja terhadap dokumen Perjanjian Kinerja awal T.A 2025 diatas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

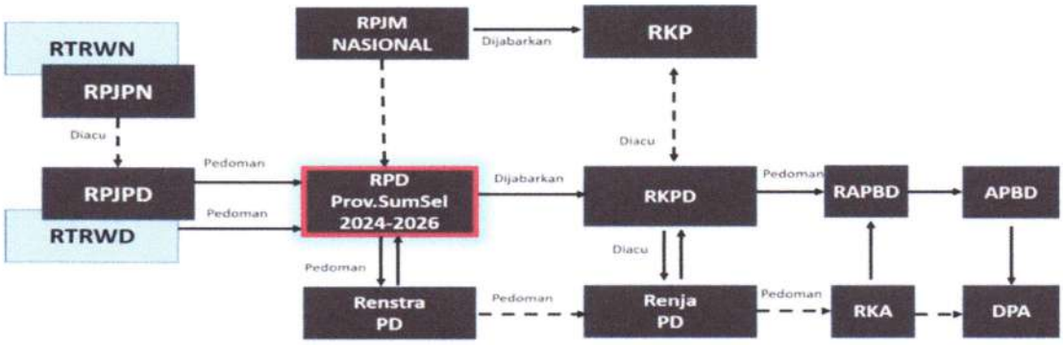


***Tabel II.2 Sinkronisasi Perjanjian Kinerja Tahun terhadap Program dan Kegiatan serta arah kebiajakan Perangkat Daerah***

Selanjutnya terkait dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025-2029 yang telah disusun sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dimana telah ditetapkan Visi serta Misi Gubernur Terpilih sebagaimana dijelaskan diatas maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun anggaran 2025 yang telah berkesesuaian dan selaras dengan dokumen RPJMD serta Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025 – 2029.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air serta penanggulangan sumber daya yang berkelanjutan | 1.1. Kapasitas Air Baku | $m^3$/detik | **2,24** |
| | | 1.2. Indeks Ketahanan Air Provinsi | Indeks | **3,57** |

## Akuntabilitas Kinerja

***Bab 3 Berisi :***

1. *Capaian Kinerja*
2. *Realisasi Anggaran*

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta implementasi pencapaian sasaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dirinci pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus Perhitungan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Produksi Komoditas Unggulan** | Persentase Kawasan Sumber Daya Air yang Terkelola Dengan Baik | - Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan/Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik | - Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi | $\frac{\text{Luas Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$ |
| 2. | **Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada Daerah Bencana yang Berisiko Tinggi** | Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaman Wilayah Sungai Yang Ditanggulangi | - Berkurangnya Sedimentasi Pada Aliran Sungai dan Bangunan Pengendali Banjir dan Meningkatnya Pengamanan Kawasan Tebing dan Longsor | - Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir | $\frac{\text{Luasan Kawasan Banjir/Longsor Yang Ditangani}}{\text{Luasan Kawasan Rawan Banjir/Longsor}} \times 100\%$ |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Kondisi Kinerja Pada Awal RPD | Satuan | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | TAHUN 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi (Permendagri 18) | 58,24 | % | 59,74 | 61,24 | 62,73 | 62,73 |
| 2. | Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir (Permendagri 18) | 88,05 | % | 87,82 | 91,86 | 95,91 | 100,00 |

*Tabel III.2 Tabel Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026*

Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target dan realisasi pencapian target masing-masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK). Adapun pengukuran kinerja terhadap target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

## Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja pada tahun ini telah disesuaikan dengan Indikator kinerja yang menjadi tolak ukur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk capaian kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dirinci pada tabel capaian berikut beserta target dan realisasi kinerja tahun anggran 2025 serta target hingga akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 diuraikan pada tabel berikut ini :

*Tabel III.3 Tabel Target dan caapian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 serta target akhir RPJMD*

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2025 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD 2024-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | ***Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*** | | | | | |
| 1 | **Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan Longsor** | % | **91,86** | **100,00** | 95,91 | 100,00 |
| 2 | **Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi** | % | **61,24** | **56,07** | 62,73 | 56,07 |

Pencapaian Kinerja tahun 2025 juga telah dituangkan dalam Rencana Aksi tahun anggaran 2025, dimana telah diuraikan Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Suamtera Selatan. Sebagaimana penjelasan melalui tabel berikut ini:

***Tabel III.4 Tabel Rencana Aksi Program dan Kegiatan tahun 2025***

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUNAN | SATUAN | TARGET TRIWULAN | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi | SATUAN | Realisasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | | | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | - Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan/Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik | **- Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi** | **61,24** | **%** | **14,02** | **19,86** | **14,68** | **12,68** | **Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Lintas Daerah Kab/Kota** | **Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi** | **56,07** | **%** | **14,02** | **19,86** | **14,68** | **12,68** |
| | | - Luas Daerah Irigasi Permukaan Yang Terairi | 39.824 | Ha | 9.956 | 9.956 | 9.956 | 9.956 | - Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Daerah Irigasi Permukaan yang terairi | 39.824 | Ha | 9.956 | 9.956 | 9.956 | 9.956 |
| | | - Luas Daerah Irigasi Rawa Yang Terairi | 16.998 | Ha | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | - Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi | 16.998 | Ha | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | - Meningkatnya Pengamanan Kawasan tebing rawan longsor dan berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai | **- Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir dan Longsor Yang Terlindungi Oleh Insfrastruktur Pengendalian Banjir dan Longsor** | **91,86** | **%** | **21,96** | **12,77** | **28,57** | **28,57** | **Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota** | **Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir** | **100,00** | **%** | **21,96** | **12,77** | **28,57** | **28,57** |
| | | - Luas kawasan bebas bencana longsor | 2.000 | M | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5,00 | - Kegiatan Pembangunan Perkuatan Tebing | Luas kawasan bebas bencana longsor | 2.000 | M' | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Panjang aliran sungai dan Bangunan pengendalian banjir yang dinormalisasi | 12.000 | M | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Kegiatan Normalisasi / Restorasi Sungai | Panjang aliran sungai dan bangunan pengendalian banjir yang dinormalisasi | 12.000 | M' | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | - Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Tampungan Air dan Penyediaan Air bAku | 1 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air6 Lainnya | Luas embung yang dibangun | - | Ha | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - Kegiatan Pembangunan Polder / Kolam Retensi | Luas kolam retensi yang dibangun | 0,75 | Ha | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | | | | - Pengelolaan Hidrologi dan kualitas Air WS Musi Kewenangan Provinsi | Jumlah Pos Hidroklimatologi yang dijaga | 40 | Pos | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adapun penjelasan dari capian indikator kinerja di setiap sasaran strategis berdasarkan tabel diatas dapat dihjelaskan sebagai berikut :

1. Pada Sasaran Meningkatnya Penanganan Kawasan Tebing Rawan Longsor dan Berkurangnya Sedimentasi pada Aliran Sungai target Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Longsor yang ditetapkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan hingga Akhir Periode RPD Tahun 2024-2026 Seluas 95,91 Ha dari luas total Kawasan rawan bencana Provinsi Sumatera Selatan 1.380.817 Ha.

   Dimana realisasi terhadap Indikator Persentase Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Longsor Tahun 2025 Sebesar **77,16%** dari target **91,86 %** dengan penjelasan sebagai berikut :

   - Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan longsor pada tahun 2025 seluas: **35,79 %.**
   - Luas kawasan rawan longsor yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan longsor pada tahun 2025 seluas: **41,372 %.**

   Capaian tersebut didukung oleh faktor wilayah Provinsi Sumatera Selatan yeng merupakan daerah kaya sumber daya air. Air permukaan merupakan sumber daya air paling strategis karena dapat dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan makhluk hidup. Ketersediaan air permukaan di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi keberadaan lebak, embung, dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian dapat menimbulkan banjir ddikarenakan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul genangan pada beberapa wilayah kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Sumatera Selatan yang ketinggiannya sejajar Sungai atau dibawah Sungai.

   Terkait hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, dapat diuraikan disini bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki kewenangan langsung terkait pengelolaan pada wilayah sungai namun hal tersbut saat ini bukan hambatan yang terlalu besar dikarenakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air telah menjalin komunikasi intensif dan Koordinasi antar pemangku kepentingan/Stake holder.

2. Pada Sasaran Terwujudnya Insfrastruktur Daerah Irgasi Permukaan/Irigasi Rawa yang Berfungsi Baik Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang direhabilitasi/optimalisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 51.049 Ha dengan persentase realisasi kinerja yaitu sebesar **56,07%** dimana dengan target yang ditetapkan sebesar **61,24** % dari Luas total 91.050 (Permen PU No 14 Tahun 2015), denagan penjelasan sebagai berikut :

   - Luas Daerah Irigasi Permukaan yang direhabilitasi pada tahun 2025 seluas **37,092 Ha** dengan target seluas 40.589 Ha.
   - Luas Daerah Irigasi Rawa yang direhabilitasi pada tahun 2025 seluas **13,957 Ha** dengan target seluas 17.598 Ha.

   Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang didukung kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Lintas Daerah Kab/Kota, dimana realisasi kinerja pada tahun anggaran 2025 belum dapat memenuhi target yang diharapakan dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya terdapat beberapa Isu strategis yang dihadapi wilayah Sumatera berupa tingginya kerentanan dan potensi bencana yang menyebabkan terdapat beberapa Daerah Irigasi (D.I.) yang terdampak langsung berupa tidak berfungsi sebagian atau keseluruhan jaringan pada Daerah Irigasi tersebut diantaranya Daerah Irigasi Air Pangi, Daerah Irigasi Air Mulak pada Kabupaten Lahat yang terdampak bencana banjir bandang pada tahun 2025 serta beberapa Daerah Irigasi lainnya yang menyebabkan jaringan atau saluran rusak berat hingga ringan.

Isu tersebut menunjukkan beberapa tantangan permasalahan dan kendala yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan ke depan untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, terutama tantangan terhadap dampak perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan penggunaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan.

## Perbandingan Kinerja Tahun Ini dan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, mengalami peningkatan dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Adapun Perbandingan target dan Realisasi Kinerja antar periode tahun anggaran dapat dijelaskan dengan rinci melalui tabel berikut ini :

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Semula | Target | Realisasi | Semula | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| ***Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*** | | | | | | | | | |
| Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi | Ha | 33.595 | 31.355 | 32.899 | 35.095 | 32.855 | 32.649 | 39.824 | 37.092 |
| Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi | Ha | 107.400 | 10.500 | 11.714 | 23.100 | 13.000 | 13.289 | 16.998 | 13.957 |
| Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Tampungan Air dan Penyediaan Air Baku | M3 | 42 | - | | 48 | - | | 585.400,67 | 640.044,00 |
| Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan longsor | % | 67,9 | 79,11 | 78,26 | 80,44 | 100 | 101,02 | 87,82 | 100,00 |
| Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 64,41 | 51,57 | 54,66 | 73,63 | 56,07 | 56,44 | 59,74 | 56,07 |

Adapun penjelasan tabel diatas sebagai berikut :

Untuk Realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Luas daerah irigasi permukaan yang terairi pada tahun 2024, dengan target 31.355 Ha dan realisasi 32.889 Ha dimana realisasi tahun 2024 sebesar 32.649 Ha
- Luas Daerah irigasi rawa yang terairi pada tahun 2024 dengan target 10.500 ha dan realisasi 11.700 Ha dimana realisasi tahun 2024 sebesar 13.289 Ha
- Luas Irigasi Partisipatif, dengan target tahun 2024 dengan target 5.100 Ha dan realisasi 5.153 Ha. dimana realisasi tahun 2024 sebesar 5.447 Ha.
- Volume ketersediaan air baku dengan target tahun 2022 55.000 M3 dan realisasi 45.000 M3. Dengan realisasi tahun 2023 realisasi 430.942 M3

Sasaran meningkatanya kinerja pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi. Memiliki indikator tolak ukur utama berupa Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi

yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan target pada tahun 2022 sebesar 51,57% dan dengan realisasi 54,66%.

Meningkatnya kinerja pengendalian daya rusak air memiliki indikator tolak ukur utama berupa Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dengan target pada tahun 2022 sebesar 78,42% dan dengan capaian Untuk perhitungan indikator tersebut juga didukung malalui indikator kinerja :

- Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor pada tahun 2025 dengan target 9.315 Ha dan realisasi 9.500 Ha dan realisasi pada tahun 2023 11.103 Ha.

Berdasarkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun lalu akan disajikan analisis pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| NO | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | CAPAIAN KINERJA* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah** | % | 100,00 | 100,00 | 72,45 |
| 2 | **Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir** | % | 88,05 | 87,82 | 77,16 |
| 3 | **Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi** | % | 58,24 | 59,74 | 82,58 |

## 3.2 Realisasi Anggaran

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Akhir Desember pada OPD PSDA Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

A. Realisasi Belanja Perangkat Daerah Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

| Uraian | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Keuangan (%) | | | | Fisik (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Nilai Realisasi Terhadap Target | Target s.d. Bulan ini | Realisasi s.d. Bulan ini | Nilai Realisasi Terhadap Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3)/(2) *100% | (6) = (5)/(4) *100% | (7) | (8) | (9) = (8)/(7) *100% |
| **Total Belanja** | **100.254.930.000** | **81.817.921.810** | **100,00** | **81,61** | **81,61** | **100,00** | **98,62** | **98,62** |
| **Belanja Operasi** | **54.755.021.734** | **45.364.524.775** | **100,00** | **82,85** | **82,85** | **100,00** | **97,99** | **97,99** |
| -Belanja Pegawai | 14.674.587.000 | 13.147.173.643 | 100,00 | 89,59 | 89,59 | 100,00 | 94,14 | 94,14 |
| -Belanja Barang dan Jasa | 40.080.434.734 | 32.217.351.132 | 100,00 | 80,38 | 80,38 | 100,00 | 99,40 | 99,40 |
| **Belanja Modal** | **45.499.908.266** | **36.453.397.035** | **100,00** | **80,12** | **80,12** | **100,00** | **99,37** | **99,37** |

Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 81.817.921.810 atau 81,61% dan realisasi fisik 98,62%.

Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 45.364.524.775 atau 82,85% dan realisasi fisik 97,99%.

Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 36.453.397.035 atau 80,12% dan realisasi fisik 99,37%.

B. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN di Provinsi Sumatera Selatan

| K/L/Program/Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (%) | |
|---|---|---|---|
| | | Keuangan | Fisik |
| **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** | | | |
| **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** | **21.557.010.000,00** | **96,82** | **100,00** |
| ***Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA*** | ***20.162.470.000,00*** | ***98,46*** | **100,00** |
| Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara | 5.584.955.000,00 | 97,32 | 100,00 |
| Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara | 14.577.515.000,00 | 98,89 | 100,00 |
| Program Dukungan Manajemen | 1.394.540.000,00 | 73,19 | 100,00 |

Pagu : Rp. 21.557.010.000,-

Realisasi : Rp. 20.872.022.000,-

Progres Keuangan : 96,82%

Progres Fisik : 100,00%

*Analisis dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung sektor Pertanian dan sektor pengendalian bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pengelolaan Sumber Daya Air pada sektor pertanian berupa pengelolaan Jaringan Irigasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pada sektor pertanian atau ketahanan pangan, Sehingga dengan adanya jaringan irigasi yang terairi yang berkelanjutan [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana.

Pertumbuhan pembangunan sektor Pertanian di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari Provinsi Sumatera Selatan merupakan Lumbung pangan Nasional nomor 5 di Indonesia.

Potensi sumber daya air permukaan yang berasal dari 9 (sembilan) sungai besar dan kecil dibagi dalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Musi, SWS Sugihan dan SWS Banyuasin dengan luas lebih kurang 94.028 KM2 dan kapasitas 103.589 x 106 M3. Potensi tersebut baru dimanfaatkan 4,11% atau 4.966 x 106 M3 untuk kebutuhan pertanian, air minum, industri, penggelontoran, perikanan dan peternakan, sementara sisanya 115.684 x 106 M3 atau 98,59% belum dimanfaatkan.

Tabel Potensi lahan irigasi dan rawa yang dapat dan telah dikembangkan menjadi persawahan atau pertanian seluas 976.133 Ha ( Gambar 2 dan Gambar 3 ), yang terdiri dari :

a. Daerah Irigasi Permukaan seluas : 41.541 Ha

- Daerah Irigasi yang berfungsi : 11.356 Ha
- Daerah Irigasi Potensial : 25.166 Ha
- Daerah Irigasi Alih Fungsi : 3.207 Ha

- Daerah Irigasi menjadi Permukiman : 1.812 Ha

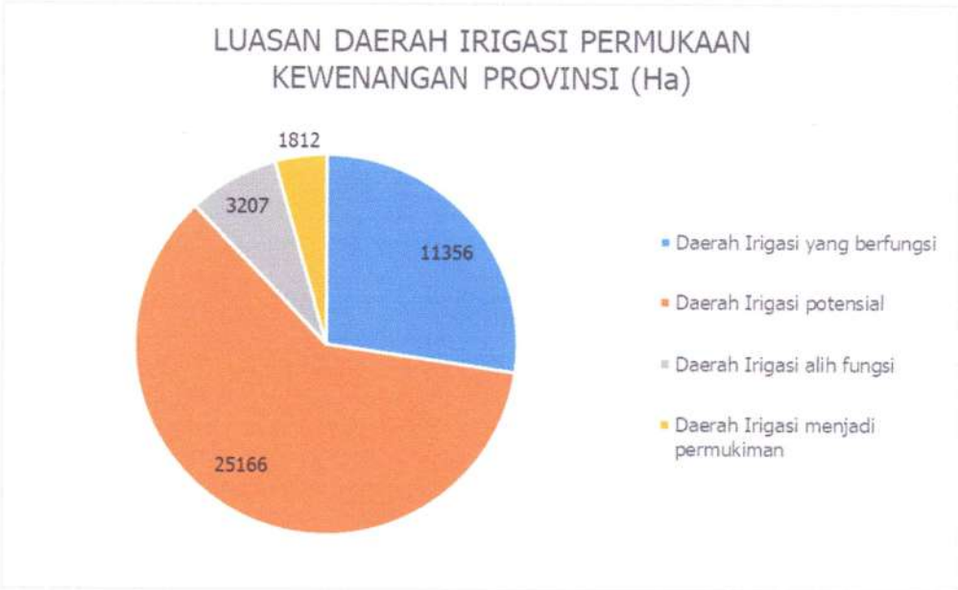


*Gambar 1 : Diagram Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumsel*

b. Daerah Irigasi Rawa seluas : 49.509 Ha

- Daerah Irigasi Rawa Potensial : 41.741 Ha
- Daerah Irigasi Rawa Berfungsi : 7.768 Ha

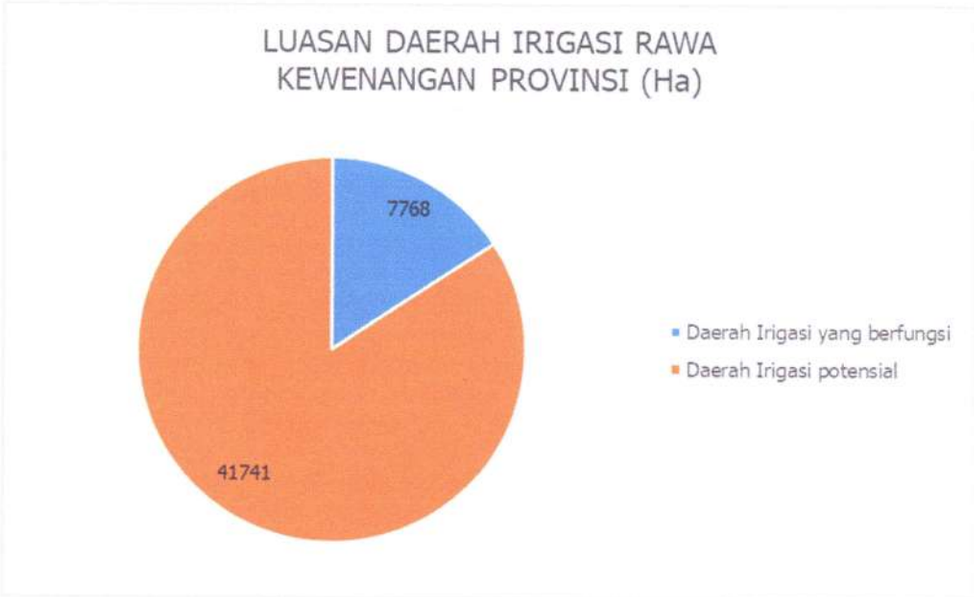


*Gambar 2 : Diagram Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Sumsel*

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat didefinikasikan beberapa isu permalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan diantaranya sebagai berikut :

- Kerusakan Infrastruktur Jaringan Irigasi Permukaan penunjang

pertanian terus meningkat

- Bertambahnya Alih fungsi lahan sawah ke non sawah
- Ketersediaan air baku yang menurun (dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas)
- Banjir, longsor/erosi dan sedimentasi
- Terjadinya perubahan iklim global yang ekstrim
- Maraknya pembakaran hutan di daerah rawa gambut
- Masih besarnya potensi lahan sub optimal yang ada di Sumatera Selatan yang belum tersentuh/dikembangkan terutama pada Daerah Irigasi Rawa.

**Pelaksanaan tindak lanjut** dalam perbaikan kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Kedepan dituangkan dalam *Rencana Aksi* berupa Peningkatan ketahanan pangan sebagai daerah Lumbung Pangan Nasional dan Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan longsor. Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang diterjemahkan kedalam Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi Daerah Irigasi Permukaan, Daerah Irigasi Rawa dan Daerah Irigasi partisipatif.
2. Peningkatan Jumlah Kawasan Bebas Bencana Banjir.
3. Peningkatan Jumlah Kawasan Bebas Longsor.
4. Peningkatan Jumlah ketersediaan Air Baku untuk Pertanian.

# BAB 4 Penutup

## Penutup

**Bab 4 Berisi :**

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun peralihan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024 -2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 4.1 Kesimpulan

Terhambatnya pelaksanaan kegiatan konstruksi yang sudah direncanakan di triwulan I dan II dan akan ditindaklajuti dengan Melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiaptan dengan melakukan percepatan di lapangan sehingga penyelesaian kegiatan tepat waktu. Selain hal tersebut ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator, hal tersebut diantaranya ;

1. Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan target yang direncanakan pada RPJMD. Dana yang tersedia masih dianggap kurang untuk memelihara daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumsel agar kondisi jaringan Irigasi optimal.
2. Cuaca buruk dan gangguan alam berupa bencana banjir bandang di beberapa kabupaten (Kab. Lahat, Kab. OKU Selatan) menyebabkan kerusakan bangunan saluran dan bendung dimana salah satu Daerah Irigasi (D.I) yaitu pada D.I Air Mulak Kab. Lahat, D.I Air Gohong, D.I Air Pangi dan beberapa Daerah Irigasi permukaan lainnya sehingga mengurangi luas Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang terairi.
3. Provinsi Sumsel tidak memiliki kewenangan sungai, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015, sehingga ketika akan melakukan kegiatan pengendalian banjir harus melakukan konfirmasi kepada BBWSS VIII sebagai pemegang kewenangan sungai di Provinsi Sumsel.
4. Kondisi alam di Provinsi Sumsel yang semakin menurun disebabkan antara lain berkurangnya luas hutan lindung yang mengakibatkan sungai-sungai yang berada di daerah sekitar mengalami bencana

hampir setiap tahun (5 tahun terakhir) walaupun dalam kondisi musim hujan yang normal (tidak ekstrim).

Dapat disampaikan disini selain beberapa faktor penghambat diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam keberhasilan pencapaian, diantaranya ;

1. Daerah Irigasi Rawa yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam pembukaan lahan pertanian yang baru.
2. Daerah Irigasi Teknis/ Permukaan yang mempunyai dampak cukup besar dalam menopang penghidupan masyarakat/ petani baik dalam penyediaan air untuk sehari-hari maupun lahan pertanian apabila kondisi irigasi tersebut optimal.

Sasaran dalam Agenda Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas berupa Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

## 4.2 Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut dalam perbaikan kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Kedepan dituangkan dalam Rencana Aksi berupa Peningkatan ketahanan pangan sebagai daerah Lumbung Pangan Nasional dan Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan longsor. Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang diterjemahkan kedalam Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi Daerah Irigasi Permukaan, Daerah Irigasi Rawa dan Daerah Irigasi partisipatif.
2. Peningkatan Jumlah Kawasan Bebas Bencana Banjir.
3. Peningkatan Jumlah Kawasan Bebas Longsor.
4. Peningkatan Jumlah ketersediaan Air Baku untuk Pertanian.

Evaluasi tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan capaian kinerja periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

1) Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya oleh pemerintah pusat, sehingga penanganan sungai tidak dapat dilaksanakan secepatnya.

2) Penyedian air baku belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan irigasi, rumah tangga, perkotaan, dan industri.

3) Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum optimal.

4) Terdapat defisit air irigasi pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) serta bangunan irigasi yang sudah berumur.

5) Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan sumber daya air yang menyebabkan observasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.

6) Masih terdapatnya lahan pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan provinsi yang belum tersentuh/dikembangkan, hal ini merupakan faktor pendorong potensi pengelolaan irigasi yang berkelanjutan kedepannya.

Selanjutnya, periode pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025, Oleh sebab itu, disusun kembali dokumen RPJMD untuk periode ini. Dokumen RPJMD tahun 2025-2029 ini juga selaras dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah

***"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA".***

Sebagai upaya mengatasi isu-isu tersebut diatas dan keterkaitan kebijakan pada Visi serta Misi Gubernur terpilih tahun 2025-2029 dan perbaikan kinerja kedepan, Dinas Pengeleolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah menyelaraskan Tujuan/Sasaran dan Indikator pada

berkesesuaian terhadap Dokumen RPJMD tahun 2025-2030, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut ini:

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air serta penanggulangan sumber daya yang berkelanjutan | 1.1. | Kapasitas Air Baku | $m^3$/detik | 2,24 |
| | | 1.2. | Indeks Ketahanan Air Provinsi | Indeks | 3,57 |

Untuk selanjutnya semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja baik bagi perangkat daerah pemangku maupun stakeholder terkait.

**LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Ess II Tahun 2025 dan Perubahan 2025

Lampiran 3. Pohon Kinerja/Cascading

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LkjIP tahun sebelumnya

Lampiran 5. Evalusi Kinerja dan Rencana Aksi Perangkat Daerah

Lampiran 6. Pernyataan Telah Direviu

Lampiran 7. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Sakip Tahun 2025

**Matriks**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 - 2026**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Program | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal RPD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | Uraian/Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | TAHUN 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Produksi Komoditas Unggulan | Persentase Luasan Daerah Irigasi Permukaan dan Daerah Irigasi Rawa yang Terairi | Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan /Irigasi Rawa yang berfungsi baik | Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | % | 58.24 | 59.74 | 61.24 | 62.73 | Target Capaian dibandingkan dengan seluruh luasan Daerah Irigasi Permukaan dan Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi (91.050 Ha) |
| 2. | Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada Daerah Bencana yang Berisiko Tinggi | Persentase Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Longsor yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Perkuatan Tebing | Meningkatnya Pengamanan Kawasan Tebing Rawan Longsor dan Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai | Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Longsor | | % | 88.05 | 87.82 | 91.86 | 95.91 | Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir, Longsor dan Tampungan Air Baku Hingga Akhir Periode RPD Tahun 2024-2026 Seluas 68.040 Ha dari luas total 2.144.990 Ha (sesuai Dengan KepGub No.127/KPTS/DPSDA/2021, tanggal 16 Februari 2021) |

Palembang, 18 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Ir. H. Herwan, M.T.**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660601 199003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**
**Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan**
**Tahun 2025-2029**

Nama Unit Organisasi : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
Urusan Bidang : Pekerjaan Umum
Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang Prasarana Wilayah Pengairan.
Fungsi :
1. Perumusan dan Perencanaan Kebijaksanaan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Pengembangan Pengairan, Pembinaan serta Perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur
2. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Terhadap Dinas Pengairan Kabupaten/Kota di Bidang Pengairan
3. Penyediaan Dukungan/ Bantuan Untuk Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Prasarana dan Saranan Pengairan
4. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi/Rawa/Sungai Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Gubernur
5. Pengelolaan Tata Usaha Dinas
6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Tugas-Tugas Lain yang Diberikan Oleh Gubernur

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air serta penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan** | Kapasitas Air Baku | $M^3$/detik | - Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya | Total Kapasitas Debit Pengambilan Air Yang Dapat Diolah dan atau Dimanfaatkan Untuk Keperluan Domestik, Perkotaan, Industri dan Lain-lain di Setiap Sumber Air Meliputi Mata Air, Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan dan atau Sumber Air Lainnya | Buku Informasi Statistik Insfrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD |
| | | Indeks Ketahanan Air Provinsi | Indeks | - Keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air | Formulasi antara target pusat/nasional dan penyamaan kondisi geografis antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi, DKI Jakarta yang dimana Provinsi tersebut telah memiliki target perhitungan | Peraturan Presiden No.37 Tahun 2023 tentang JAKNAS dan Peraturan Menteri PU No. 02 Tahun 2024 | |

Palembang, 2025
**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

**Ir. H. Herwan, MM.**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660601 199003 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
Jalan Kapt. Anwar Sastro No. 1251 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 355362 Fax. (0711) 361381 Kode Pos 30126
Website: www.sumselprov.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. HERWAN, M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2025

| PIHAK KEDUA<br>Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, | PIHAK PERTAMA<br>KEPALA DINAS PENGELOLAAN SDA<br>PROVINSI SUMATERA SELATAN, |
|---|---|
| ELEN SETIADI, S.H., M.S.E. | Ir. H. HERWAN, M.M.<br>Pembina Utama Madya (IV/d)<br>NIP. 19660601 199003 1 004 |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan/Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik | - Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi | 61,24 % |
| 2. | - Meningkatnya Pengamanan Kawasan Tebing Rawan Longsor dan Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai | - Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor Yang Terlindungi Oleh Insfrastruktur Pengendalian Banjir | 91,86 % |

| No. | Program | | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 38.578.907.921 | APBD |
| 2. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Rp | 93.398.286.039 | APBD |

Palembang, 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. H. HERWAN, MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660601 199003 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
Jalan Kapt. Anwar Sastro No. 1251 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 355362 Fax. (0711) 361381 Kode Pos 30126
Website: www.sumselprov.go.id

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. HERWAN, M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. HERMAN DERU
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA SELATAN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2025

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
| **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,** | **KEPALA DINAS PENGELOLAAN SDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,** |
| **H. HERMAN DERU** | **Ir. H. HERWAN, M.M.**<br>Pembina Utama Madya (IV/d)<br>NIP. 19660601 199003 1 004 |

Dipindai dengan CamScanner

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air serta penanggulangan sumber daya yang berkelanjutan | 1.1. Kapasitas Air Baku | $m^3$/detik | 2,24 |
| | | 1.2. Indeks Ketahanan Air Provinsi | Indeks | 3,57 |
| | | | | |

| No. | Program | | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 31.956.347.681 | APBD |
| 2. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Rp | 86.540.404.416 | APBD |
| 3. | Program Ketahanan Sumber Daya Air | Rp | 20.290.469.000 | APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 4. | Program Dukungan Manajamen | Rp | 1.394.540.000 | APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

**Palembang, 2025**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**H. HERMAN DERU**

**KEPALA DINAS**
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Ir. H. HERWAN, M.M.**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660601 199003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

**Tabel 4.2**
**Cascading Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**
**Provinsi Sumatera Selatan**

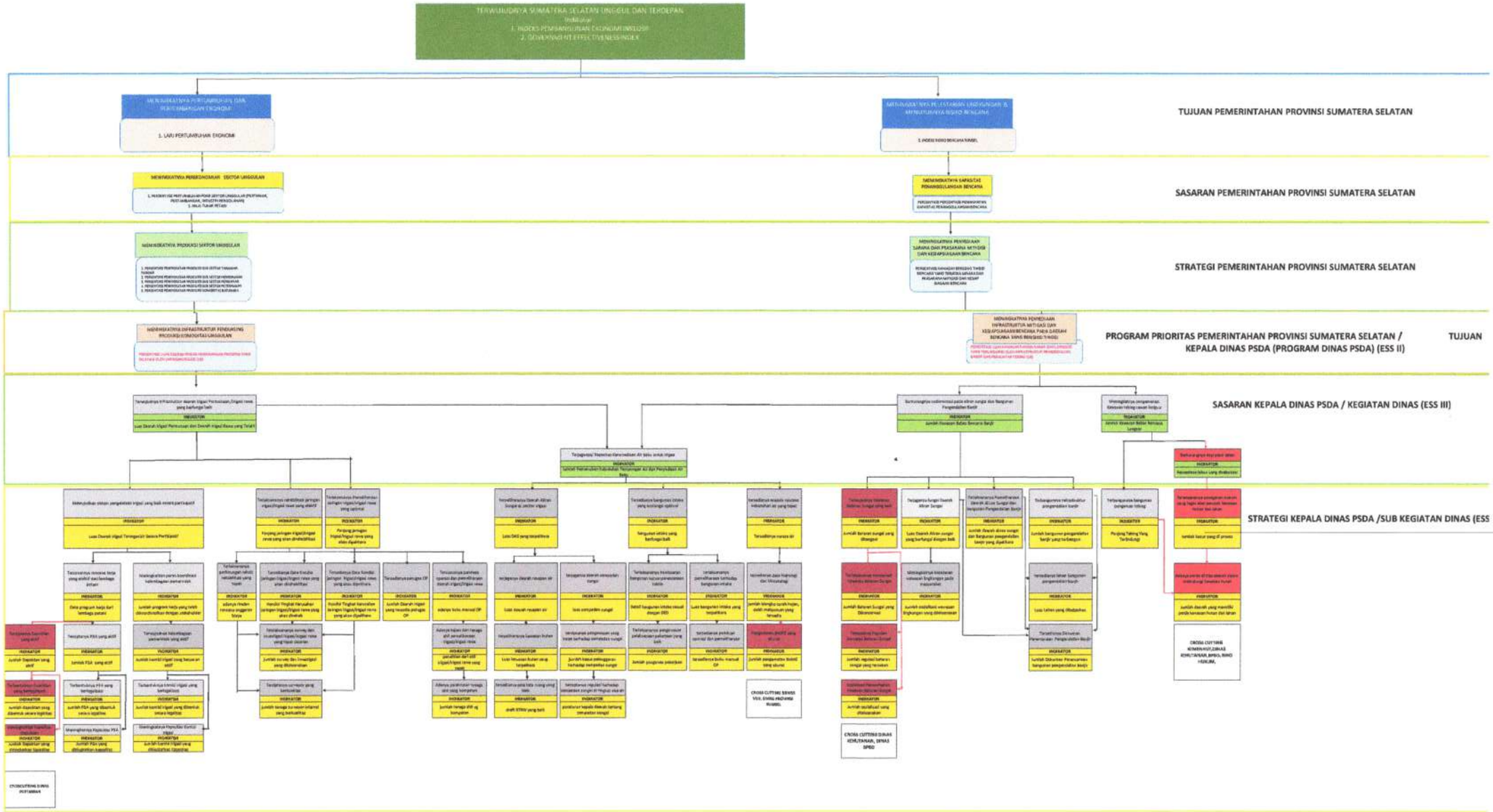

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP ) PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2024**

| No. | REKOMENDASI | KOMPONEN PADA SAKIP | RENCANA AKSI / LANGKAH KERJA | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | DATA DUKUNG (UPLOAD) | ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | WAKTU PELAKSANAAN | KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT | OUTPUT / HASIL | UNIT PENANGGUNJAWAB | KETERANGAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | SELESAI | DALAM PROSES | BELUM |
| 1 | *LHE AKIP PD TAHUN 2024 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 700/04/ITDAPROV. III/2024 TANGGAL 26 JULI 2024* | Perencanaan | Telah terdapat penyelarasan dokumen perencanaan dan telah dipublikasikan tepat waktu | - | https://drive.google.com/file/d/1xuXZ4hmbOAw_HjNUbnXRfVXcp3qVMcyG/view?usp=drive_link | - | √ | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2025 | Penyelarasan dokumen perencanaan telah berjalan dan dipulikasikan tepat waktu | Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | √ | | |
| 2 | *LHE AKIP PD TAHUN 2024 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 700/04/ITDAPROV. III/2024 TANGGAL 26 JULI 2024* | Pengukuran Kinerja | - Rencana aksi kinerja telah disusun secara berkala | - | https://drive.google.com/file/d/1ROxc4D28ZszQmWNnisVMpizMkEiKtWvr/view?usp=drive_link | - | √ | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2025 | Telah dilakukan evaluasi dan menjadi catatan perbaikan terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan selanjutnya | Sasaran dan Indikator yg menjadi tolak ukur hasil perencanaan telah diselaraskan melalui Dokumen Perencanaan PD diantaranya dokumen RENSTRA/RENJA/LKJIP PD | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | √ | | |
| | | Pengukuran Kinerja | - Laporan monitoring dan evaluasi yang telah mengambarkan pengukuran kinerja terhadap pemenuhan PK eselon II hingga esselon IV per triwulan | - | https://drive.google.com/file/d/1En2Q5Zf9VFceUULBvcceJEU9_I0YDOkn/view?usp=drive_link | - | √ | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2027 | Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan | Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengukuran Kinerja | - Pengumpulan data capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) | - | https://drive.google.com/file/d/15LtG3f5UmCBn9Qn6pv6s5CrlL9f8i9Ab/view?usp=drive_link | - | √ | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2025 | Telah dilaksanakan, namun terkendala pada server/WEB-site yang belum updating | Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | | √ | |
| | | Pengukuran Kinerja | - Pengukuran kinerja tahunan mempengaruhi penyesuaian organisasi dan dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta pengukuran kinerja sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | - | https://drive.google.com/file/d/1d9D3cH5hMQiDsu2ZwLI3a9-snlyO8cgJ/view?usp=drive_link | - | √ | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2025 | Telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring | Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | √ | | |
| 3 | *LHE AKIP PD TAHUN 2024 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 700/04/ITDAPROV. III/2024 TANGGAL 26 JULI 2024* | Pelaporan Kinerja | Dokumen laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi atas pencapaian kinerja, pembandingan data kinerja, keberhasilan/kegagalan indikator kierja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan | - | https://drive.google.com/file/d/1zXuk765zYb0O1I5K5F5ol3vc-IhdAF02/view?usp=drive_link | - | √ | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2025 | Telah dilakukan evaluasi dan tertuang pada laopran kinerja yang telah diperbaiki dan disempurnakan | Sasaran dan Indikator yg menjadi tolak ukur hasil perencanaan telah diselaraskan melalui Dokumen Perencanaan PD diantaranya dokumen RENSTRA/RENJA/LKJIP PD | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | √ | | |
| 4 | *LHE AKIP PD TAHUN 2024 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 700/04/ITDAPROV. III/2024 TANGGAL 26 JULI 2024* | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program, kegiatan dan penyerapanan anggaran | - | https://drive.google.com/file/d/1u1gWcmqUMMYgnimOHDTkkBZ3Nxu43l1-/view?usp=drive_link | - | √ | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2025 | Telah terdapat peningkatan capaian kinerja yang telah diintervensi melalui anggaran dan pelaksanaan kegiatan | Sasaran dan Indikator yg menjadi tolak ukur hasil perencanaan telah diselaraskan melalui Dokumen Perencanaan PD diantaranya dokumen RENSTRA/RENJA/LKJIP PD | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | - Evaluasi sepenuhnya dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja | - | https://drive.google.com/file/d/1dPD3cH5bMQiDsu2ZwLI3a9-snlyO8cgJ/view?usp=drive_link | - | v | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2025 | Telah terdapat peningkatan capaian kinerja yang telah diintervensi melalui anggaran dan pelaksanaan kegiatan | Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | v | | |
| | | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | - Evaluasi atas rekomendasi hasil APIP tahun lalu akan segera ditindaklanjuti | - | https://drive.google.com/file/d/1SHqCPMqJUo8JA56QbFgUhZ1kjdzCa3WU/view?usp=drive_link | - | v | - | - | - | Jan-Feb Tahun 2025 | Telah dilakukan evaluasi dan menjadi catatan terhadap rencana aksi yang akan dilakukan | Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | Sekretaris Dinas dan Kasubbag Perencanaan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan | v | | |
| Jumlah Total Rekomendasi sebanyak 8 (delapan) rekomendasi | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Total Rekomendasi sebanyak 7 (Tujuh) rekomendasi | jumlah rekomendasi Dalam Proses 1 ( satu ) rekomendasi | jumlah rekomendasi belum - |

Palembang, Februari 2025
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Ir. H. HERWAN., M.M.**
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.D
NIP. 19660601 199003 1 004

# RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUNAN | SATUAN | TARGET TRIWULAN | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUNAN | SATUAN | TARGET TRIWULAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | | | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | - Tarwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan/Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik | - **Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi** | **61,24** | **%** | **14,02** | **19,86** | **14,68** | **12,68** | **Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Lintas Daerah Kab/Kota** | **Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi** | **61,24** | **%** | **14,02** | **19,86** | **14,68** | **12,68** |
| | | - Luas Daerah Irigasi Permukaan Yang Terairi | 39.824 | Ha | 9.956 | 9.956 | 9.956 | 9.956 | - Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Daerah Irigasi Permukaan yang terairi | 39.824 | Ha | 9.956 | 9.956 | 9.956 | 9.956 |
| | | - Luas Daerah Irigasi Rawa Yang Terairi | 16.998 | Ha | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | - Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi | 16.998 | Ha | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | - Meningkatnya Pengamanan Kawasan tebing rawan longsor dan berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai | - **Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir dan Longsor Yang Terlindungi Oleh Insfrastruktur Pengendalian Banjir dan Longsor** | **91,86** | **%** | **21,96** | **12,77** | **28,57** | **28,57** | **Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota** | **Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir** | **91,86** | **%** | **21,96** | **12,77** | **28,57** | **28,57** |
| | | - Luas kawasan bebas bencana longsor | 2.000 | M | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5,00 | - Kegiatan Pembangunan Perkuatan Tebing | Luas kawasan bebas bencana longsor | 2.000 | M' | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Panjang aliran sungai dan Bangunan pengendalian banjir yang dinormalisasi | 12.000 | M | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Kegiatan Normalisasi / Restorasi Sungai | Panjang aliran sungai dan bangunan pengendalian banjir yang dinormalisasi | 12.000 | M' | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | - Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Tampungan Air dan Penyediaan Air bAku | 1 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | - Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air6 Lainnya | Luas embung yang dibangun | - | Ha | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - Kegiatan Pembangunan Polder / Kolam Retensi | Luas kolam retensi yang dibangun | 0,75 | Ha | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | | | | - Pengelolaan Hidrologi dan kualitas Air WS Musi Kewenangan Provinsi | Jumlah Pos Hidroklimatologi yang dibangun | 40 | Pos | 10 | 10 | 10 | 10 |

*Keterangan : Dapat kami uraikan Pada Kolom 2 dan 3 yang merupakan sasaran strategis Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada tabel tersebut diatas pada kolom 10 merupakan Program dan Kegiatan dan pada kolom 11 berupa indikator yang mendukung pencapaian Sasaran dan Indikator Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.*

Palembang, 2025
**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Ir. H. HERWAN, MM.**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660601 199003 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**
**LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

**Palembang, 12 Maret 2026**
**INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE**
**Pembina Utama Madya (IV/d)**
**NIP. 197506171995011001**

\PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Telepon 0711-352362
Fax: 0711-361381
**PALEMBANG**

Nomor : 610 / 658 /PSDA/2026 Palembang, 30 Januari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rencana Aksi Tindak Lanjut Implementasi SAKIP Tahun 2025 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Yth. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Menindaklanjuti surat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/62/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 28 Januari 2026 Hal Rencana Aksi Tindak Lanjut Implementasi SAKIP Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan Rencana Aksi Tindak Lanjut Implementasi SAKIP pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. (terlampir)

Demikian kami sampaikan atas perkenan diucapkan terima kasih.

Kepala,

**Ir. H. Herwan. M.M**
Pembina Utama Muda/IV.d
NIP. 196606011990031004

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
BANGGA BUATAN INDONESIA

Dipindai dengan CamScanner

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP ) PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2025**

| No. | REKOMENDASI | RENCANA AKSI | RENCANA AKSI / LANGKAH KERJA | DATA DUKUNG (UPLOAD) | WAKTU | | | | OUTPUT / HASIL | KETERANGAN (diisi oleh APIP/Inspektorat) | | | UNIT PENANGGUNJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | SELESAI | DALAM PROSES | BELUM | |
| 1 | *Memberikan penilaian kepada seluruh pegawai pada unit organisasi* | Penialaian Kinerja dan pemantauan pelaksaannya akan dilakukan berkelanjutan | 1. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja<br>2. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut menjadi acuan setiap pegawai mengisi Kinerja Harian melalui Aplikasi My-ASN<br>3. Penilian Kinerja dilaksanakan setiap bulannya | Perjanjian Kinerja dan Dok SKP,ANJAB/ABK Pegawai<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1QhCRBnsVqiET8EkIj8DKUbcKAWvtvcsB?usp=drive_link<br><br>https://drive.google.com/file/d/1RDi6YsYdYOlVM-TlnUTbxyUvNY0wjAqh/view?usp=drive_link<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1Ewp2wQeYIPDICCk443a2I | √ | √ | √ | √ | Telah dilakukan penilaian kinerja berjenjang kepada seluruh pegawai oleh pimpinan organisasi termasuk unit pelaksana teknis PD dan pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | √ | | | Dinas PSDA Prov. Sumsel |
| 2 | *Menghimbau setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja* | Penyampaian hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai dan pelaksanaannya akan dilaksanakan berkelanjutan | 1. menyusun pengukuran kinerja instansi/OPD<br>2. Menyampaikan melalui rapat, apel, atau forum internal<br>3. melakukan monitoring dan evaluasi | Dok. PK Eselon II dan Dok. MONEV serta Nota Dinas Kepada Seluruh KPA (bukti pengukuran kinerja telah disampaikan)<br><br>https://drive.google.com/file/d/1RDi6YsYdYOlVM-TlnUTbxyUvNY0wjAqh/view?usp=drive_link<br><br>https://drive.google.com/file/d/1ruyKkv8m8eoVikLhoDqee-iiHVtd5z_H/view?usp=drive_link | √ | √ | √ | √ | - Setiap pegawai paham dan peduli atas kinerja<br>- Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | √ | | | Dinas PSDA Prov. Sumsel |
| 3 | *Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian (recofusin) organisasi* | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja secara berkala | - Menyusun Laporan monitoring dan evaluasi yang telah mengambarkan pengukuran kinerja terhadap pemenuhan PK eselon II hingga esselon IV per triwulan | Ada penyesuaian aktivitas karena hasil pengukuran kinerja berdasarkan MONEV PK (Perjanjian Kinerja)<br><br>https://drive.google.com/file/d/1En2Q57f9VFceUULBvcreJEU9_I0YDOkn/view?usp=drive_link<br><br>https://drive.google.com/file/d/17NoozfPyCSUTob13Wcpm- | √ | √ | √ | √ | Laporan monitoring dan evaluasi yang telah mengambarkan pengukuran kinerja terhadap pemenuhan PK eselon II hingga esselon IV per triwulan | | √ | | Dinas PSDA Prov. Sumsel |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *memanfaatkan hasil pemgukuran kinerja dalam penyesuaian anggaran* | Pengumpulan Data Kinerja setiap bidang secara periodik | - Pengumpulan data capaian kinerja<br>- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja secara berkala<br>- memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) | data terkait recofusing anggaran dan dok money<br><br>https://drive.google.com/file/d/1iMlcLovSFr1ABbfzRVTpxZLrlBnMST_B/view?usp=drive_link<br><br>https://drive.google.com/file/d/1 | - | √ | √ | - | Dilakukan penyesuaian Anggaran untuk target-target yang belum tercapai atau belum on the right track. | | √ | | Dinas PSDA Prov. Sumsel |
| 5 | *Melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan/semester atas hasil pengukuran kinerja pegawai dalam organisasi* | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja Pegawai | - Pengukuran kinerja tahunan mempengaruhi penyesuaian organisasi dan dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta pengukuran kinerja sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | Monitoring Evaluasi dan Rencana Aksi.<br><br>https://drive.google.com/file/d/1En2QSZf9VFceUULBvcceJEU9_I0YDOkn/view?usp=drive_link<br><br>https://drive.google.com/file/d/1ROxc4D28ZszQmWNnisVMpizMkEiKtWvr/view?usp=drive_link | √ | √ | √ | √ | Pemantauan akan dilaksanakan berkelanjutan | √ | | | Sekretariat Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan |
| 6 | *Menyusun tim reviu internal untuk melakukan reviu laporan kinerja pada unit organisasi* | Pembentukan Tim reviu internal disusun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) agar dapat melakukan reviu secara independen | - Dokumen Laporan Kinerja telah direviu secara internal. (Pegawai yang melakukan reviu laporan kinerja tidak sama dengan Pegawai yang menyusun laporan kinerja)<br>- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program, kegiatan dan penyerapanan anggaran | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.<br><br>https://drive.google.com/file/d/1Zw1o6vAnO4uKm5xbsHj9b6i5EMT5H0iE/view?usp=drive_link<br><br>https://drive.google.com/file/d/1gWkeAzo3i-UX66EAioUrLemEDWcib2Il/view?usp=drive_link | - | - | √ | √ | Pembentukan Tim Reviu Internal yang melakukan reviu kinerja secara independen dan dokumen laporan kinerja yang telah dinilai secara mandiri | | √ | | Dinas PSDA Prov. Sumsel |
| 7 | *Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja* | Pengumpulan/penyusunan Data dan Informasi yang melibatkan peran serta seluruh pegawai | - Penyajian informasi dalam laporan kinerja dinyatakan menjadi kepedulian seluruh Pegawai dengan bukti dan data dukung | LKJIP Dinas PSDA Prov. Sumsel, surat pernyataan PM Sakip dan TL LHE yang telah bertanda tangan dan paraf koordinasi<br><br>https://drive.google.com/file/d/1hZ-3EzsccSmt_t1iiV6E_vwFN9zjxyiz/view?usp=drive_link<br>https://drive.google.com/file/d/18ICS81iOvU4otiHCE7gazDcbCqUQ | √ | √ | - | - | Surat pernyataan Penilaian Mandiri (PM) Sakip tahun 2025 dan dok TL LHE | √ | | | Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | *Memanfaatkan hasil laporan kinerja dalam evaluasi pelaporan keberhasilan kinerja yang terdapat pada Bab IV laporan kinerja unit organisasi* | Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Informasi yang akurat secara berkala | - Laporan kinerja setiap unit kerja dilaporkan setiap tanggal 10 setiap bulannya<br>- Setiap hasil laporan kinerja akan digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja lebih baik kedepannya | LKIIP DPSDA, dokumen berupa lembar money dan dok. capaian kinerja per bidang dalam lingkup Dinas PSDA.<br><br>https://drive.google.com/file/d/1hZ-3Ezscc5mL_t1iiV6E_vwFN9zjxyiz/view?usp=drive_link<br><br>https://drive.google.com/file/d/1ZNoozfPyCSUTob13Wcpm-RWxb2vHmpx1/view?usp=drive_link | √ | √ | √ | √ | Data dan Informasi yang akurat | √ | | | Sekretariat Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan |

Palembang, 26 Februari 2026
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

**Ir. H. HERWAN., M.M.**
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.D
NIP. 19660601 199003 1 004

Dipindai dengan CamScanner